

## **Kajian Kelayakan dan Penentuan Pusat Kawasan Kecamatan Palabuhanratu Menjadi Kota Palabuhanratu**

### **Feasibility Study And Determination Of Area Center Palabuhanratu Districts Being Palabuhanratu City**

<sup>1</sup>Reza Miovaldi, <sup>2</sup>Ernady Syaodih

<sup>1,2</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: <sup>1</sup>miovaldireza@gmail.com, <sup>2</sup>ernadysyaodih@gmail.com

**Abstract.** *Palabuhanratu sub-district is one of the districts in Sukabumi. A very strategic location, is located on the south coast of West Java province with infrastructure that is far more complete than other districts in Sukabumi, besides the RTRW Sukabumi Year 2012 - 2032 in the spatial structure plan, District Palabuhanratu has a function as PKNp. Palabuhanratu has a primary function as a center of marine business with scale national and international service and support functions as regional development and minapolitan Ocean Fishery Harbor. The objective of the feasibility study of Palabuhanratu sub-district becomes Kota Palabuhanratu to develop a feasibility study of Palabuhanratu sub-district to Palabuhanratu city and to form a center of activity that will become a city along with the function of activities in the region. The methods used in conducting the feasibility study follow Government Regulation No. 78 of 2007 on Procedures for Establishment, Merger and Elimination of Regions to determine its feasibility and Analysis of Determination of Central Area to know the function of each region. From the results of the study conducted, it is found that District Palabuhanratu eligible to become a city with very decent category and Analysis Results Determination Area there are four hierarchy. Therefore, the Local Government of Sukabumi Regency is required to formulate Programs that support urban activities in Palabuhanratu Subdistrict to become a City that is able to compete with other regions.*

**Keywords:** Feasibility and Regional Center, District Palabuhanratu, city

**Abstrak.** Kecamatan Palabuhanratu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Letak yang sangat strategis, berada di pesisir selatan Provinsi Jawa Barat dengan berbagai infrastruktur yang sudah jauh lebih lengkap daripada kecamatan yang lain di Kabupaten Sukabumi, selain itu dalam RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 – 2032 dalam rencana struktur ruang, Kecamatan Palabuhanratu memiliki fungsi sebagai PKNp. Palabuhanratu memiliki fungsi utama sebagai pusat bisnis kelautan dengan skala pelayanan nasional dan internasional, dan fungsi penunjang sebagai kawasan pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera dan minapolitan. Tujuan Kajian Kelayakan Kecamatan Palabuhanratu menjadi Kota Palabuhanratu untuk menyusun Kajian Kelayakan Kecamatan Palabuhanratu menjadi Kota Palabuhanratu dan membentuk pusat kegiatan yang akan menjadi suatu kota beserta fungsi kegiatan di kawasan tersebut. Metode yang digunakan dalam melakukan kajian kelayakan mengikuti Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah untuk mengetahui kelayakannya dan Analisis Penentuan Pusat Kawasan untuk mengetahui fungsi tiap kawasan. Dari hasil Kajian yang dilakukan, didapat bahwa Kecamatan Palabuhanratu layak untuk menjadi kota dengan kategori sangat layak dan Hasil analisis Penentuan Kawasan terdapat empat hirarki. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi diharuskan merumuskan Program yang mendukung kegiatan perkotaan di Kecamatan Palabuhanratu agar menjadi Kota yang mampu bersaing dengan wilayah lainnya.

**Kata Kunci :** Kelayakan dan Pusat Kawasan, Kecamatan Palabuhanratu, kota.

#### **A. Pendahuluan**

Kecamatan Palabuhanratu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi, dengan luas wilayah administratif 9.175,62 hektar dan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 318.750 jiwa, Kecamatan Palabuhanratu mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada sektor perikanan dan pariwisata. Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menjelaskan bahwa di Kabupaten Sukabumi akan di bentuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) promosi tepatnya di Kecamatan Palabuhanratu, Rencana pembentukan PKNp ini juga tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat kemudian dalam perda

RTRW Provinsi Jawa Barat Kecamatan Palabuhanratu termasuk dalam rencana pengembangan sistem perkotaan. Perda Kabupaten Sukabumi No.22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032, pada pasal 8 ayat 1 dan 2 tentang perwujudan PKNp Palabuhanratu, menyebutkan akan dilakukannya pembangunan infrastruktur perkotaan dan sejumlah point lainnya yang menjadikan indikasi bahwa Kecamatan Palabuhanratu akan dijadikan Kota. Merujuk pada tiga kebijakan di atas penulis ingin melakukan kajian kelayakan Kecamatan Palabuhanratu menjadi kota. Kajian ini menarik, karena belum ada studi sebelumnya yang mengenai pembentukan kota di Kecamatan Palabuhanratu.

Tujuan dari studi yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Kajian Kelayakan Kecamatan Palabuhanratu menjadi Kota Palabuhanratu dan mengetahui bagaimana kelayakan Kecamatan Palabuhanratu menjadi Kota Palabuhanratu untuk memberikan pelayanan terhadap wilayah sekitar;
2. Membentuk pusat kegiatan yang akan menjadi suatu kota beserta fungsi kegiatan di kawasan tersebut

## **B. Landasan Teori**

### **Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (bab 1, pasal 1, ayat 25)

### **Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah**

- Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (bab 1 pasal 1)
- Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan. (bab 1 pasal 1 ayat 5)
- Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (bab 1 pasal 1 ayat 6)
- Komponen penilaian syarat teknis untuk daerah otonom baru menurut lampiran PP No.78 tahun 2007.

**Tabel 1.** Faktor Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

No.	Faktor
1.	Kependudukan
2.	Kemampuan Ekonomi
3.	Potensi Daerah
4.	Kemampuan keuangan
5.	Sosial budaya
6.	Sosial politik
7.	Luas daerah
8.	Pertahanan
9.	Keamanan
10.	Tingkat kesejahteraan
11.	Rentang kendali

sumber: pp no. 78 tahun 2007

### Analisis Penentuan Pusat Kawasan

Metode ini dilakukan untuk mengetahui pusat pelayanan berdasarkan jumlah dan jenis unit fasilitas pelayanan yang ada dalam setiap daerah. Asumsi yang dipakai adalah bahwa wilayah yang memiliki ranking tertinggi adalah lokasi yang dapat ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan (Amas Yamin, dkk dalam Pardede, 2008). Dalam analisis skalogram ini subjek diganti dengan pusat permukiman (settlement). Sedangkan objek diganti dengan fungsi atau kegiatan. Indikator yang digunakan adalah jumlah penduduk, jumlah jenis dan jumlah unit serta kualitas fungsi pelayanan yang dimiliki masing-masing daerah di Kecamatan Palabuhanratu. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam melakukan analisis pusat pertumbuhan:

#### a. Aksesibilitas

Analisis ini untuk mengetahui struktur/indeks aksesibilitas pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan, seberapa banyak jumlah fasilitas pelayanan yang ada, berapa besar fungsi dan jumlah penduduk yang dilayani serta berapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam suatu wilayah perencanaan. Maka dapat dihitung melalui rumus berikut:

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah penduduk Desa A} \times \text{Jumlah Penduduk Desa B}}{\text{jarak}^n}$$

n: Klasifikasi jalan

#### b. Gravitasi

Model ini dapat membantu perencana wilayah untuk memperkirakan daya tarik suatu lokasi dibandingkan dengan lokasi lain disekitarnya. Hal ini bi dimanfaatkan untuk simulasi apakah suatu fasilitas yang dibangun pada lokasi tertentu akan menarik cukup pelanggan atau tidak. Model ini juga dapat memperkirakan besarnya arus lalu lintas pada ruas jalan tertentu. Model ini juga banyak dipakai dalam perencanaan transportasi untuk melihat besarnya arus lalu lintas ke suatu lokasi sesuai

dengan daya tarik lokasi tersebut (Tarigan, 2004). Maka dapat dihitung melalui rumus berikut:

$$\text{Rumus; } 9,8 \times \frac{\text{Jumlah penduduk Desa A} \times \text{Jumlah Penduduk Desa B}}{\text{jarak}^2}$$

c. Rank Size Kepadatan Penduduk

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa padat penduduk suatu wilayah perencanaan dengan menggunakan rumus:

$\text{Log}(y)$

$\text{Log}(x)$

Y: jumlah penduduk perdesa

X: urutan jumlah penduduk dari yang terbesar hingga terkecil

d. Skalogram

Analisis Skalogram dipergunakan untuk menganalisis pusat-pusat permukiman, khususnya hierarki atau orde-orde pusat pertumbuhan. Analisis ini dapat digunakan dengan berdasarkan kepada jumlah penduduk, jumlah unit dan jenis fasilitas pelayanan umum yang ada. Maka dapat dihitung melalui rumus berikut:

Dik:  $N_i$  = Jumlah unit sarana desa

$N_t$  = Jumlah unit sarana kecamatan

$$\text{Maka: } \frac{N_i}{N_t} \times 100$$

### Definisi Operasional

Pada definisi operasional ini menjelaskan mengenai pengertian setiap kata yang terdapat dalam judul Tugas Akhir ini. Adapun judul dari Proposal Tugas Akhir ini adalah Kajian Kelayakan dan Strategi Pengembangan Kecamatan Palabuhanratu Menjadi Kota Palabuhanratu, sehingga didalam definisi operasional dijabarkan sebagai berikut:

- Kajian : Mempelajari; memeriksa; menyelidiki; memikirkan; menguji; mengenai suatu perkara. (KBBI)
- Kelayakan: Kegiatan penentuan suatu hal melalui kriteria/faktor tertentu yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan tujuan pengujian apakah hal tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan atau tidak. (KBBI)
- Penentuan: Proses, cara, perbuatan menentukan; penetapan; pembatasan (KBBI)
- Pusat: Pokok pangkal atau yang menjadi pempunan (KBBI)
- Kawasan: daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu. (KBBI)
- Kecamatan: Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota. (PP No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan) Kecamatan juga dapat disebut wilayah dibawah kabupaten atau kota, terdiri dari desa atau kelurahan.
- Kota: Kota yang dimaksud disini adalah kotamadya; daerah otonom, yang disebutkan pada. (PP No.78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah)

Jadi dalam penyusunan tugas akhir ini Kajian Kelayakan dan Penentuan Pusat Kawasan Kecamatan Palabuhanratu Menjadi Kota Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dapat diartikan sebagai pengujian untuk menentukan Kecamatan Palabuhanratu sesuai atau tidaknya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri menggunakan faktor tertentu yang mengacu pada PP No.78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

### C. Hasil dan Pembahasan

Perhitungan yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan daerah otonom baru terdiri dari 2 macam metode yaitu metode rata-rata dan metode kuota. Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya. Sedangkan Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring terhadap calon daerah.

**Tabel 2.** Hasil Skoring dan Pembobotan Indikator untuk Kecamatan Palabuhanratu

Faktor	Indikator	Nilai skor Hasil Perbandingan dalam (%)	Skor	Bobot	Bobot x Skor
Kependudukan	1. Jumlah Penduduk	114,67	5	15	75
	2. Kepadatan Penduduk	62,66	4	5	20
<b>Sektor Kependudukan</b>					<b>95</b>
Kemampuan Ekonomi	1. PDRB non migas perkapita	80,30	5	5	25
	2. Pertumbuhan ekonomi	75,22	4	5	20
	3. kontribusi PDRB non migas	93,22	5	5	25
<b>Sektor Kemampuan Ekonomi</b>					<b>70</b>
Potensi Daerah	1. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.	50,41	3	2	6
	2. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk.	74,02	3	1	3
	3. Rasio pasar per 10.000 penduduk	108,97	3	1	3
	4. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	251,05	5	1	5
	5. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	110,33	5	1	5
	6. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	120,17	5	1	5
	7. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.	81,42	5	1	5
	8. 13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	80,75	5	1	5
	9. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	412,69	5	1	5
	10. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.	287,27	5	1	5
	11. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	93,41	5	1	5
	12. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	81,79	5	1	5
	13. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas.	131,90	5	1	5
	14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	378,67	5	1	5
<b>Sektor Potensi daerah</b>					<b>67</b>
Kemampuan Keuangan	1. Jumlah PAD	80,91	5	5	25
	2. Rasio PAD terhadap jumlah penduduk	87,38	5	5	25

Faktor	Indikator	Nilai skor Hasil Perbandingan dalam (%)	Skor	Bobot	Bobot x Skor
	3. Rasio PAD terhadap PDRB non migas	79,70	4	5	20
<b>Sektor Kemampuan keuangan</b>					<b>70</b>
Sosial Budaya	1. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk.	94,30	5	2	10
	2. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk	87,95	5	2	10
	3. Jumlah balai pertemuan	30,43	2	1	2
<b>Sektor Sosial Budaya</b>					<b>22</b>
Sosial Politik	1. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih.	106,44	5	3	15
	2. Jumlah organisasi kemasyarakatan	32,14	2	2	4
<b>Sektor Sosial Budaya</b>					<b>19</b>
Luas Daerah	1. Luas wilayah keseluruhan	1.377,92	5	2	10
	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.	1.068,59	5	3	15
<b>Sektor Luas Daerah</b>					<b>25</b>
Pertahanan	1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	82,58	5	3	15
	2. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan	81,38	5	2	10
<b>Sektor Pertahanan</b>					<b>25</b>
Keamanan	1. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	98,99	5	5	25
<b>Sektor Keamanan</b>					<b>25</b>
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	85,40	5	5	25
<b>Sektor Kesejahteraan Masyarakat</b>					<b>5</b>
Rentang Kendali	1. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)	103,56	5	2	10
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)	157,34	5	3	15
<b>Sektor Rentang Kendali</b>					<b>25</b>
<b>Total</b>					<b>469</b>

Sumber: Hasil analisis, 2018

**Tabel 3.** Cara Pemberian Skor Terhadap Persentase Perbandingan Nilai Indikator

Skor	Persentase Dari Rata-rata Nilai Indikator Daerah Pembanding Terhadap Daerah Calon
5	80-100%
4	60-79%
3	40-59%
2	20-39
1	<20%

Sumber: Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007

Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori

sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75) sesuai yang dijelaskan pada lampiran Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa skor total Kecamatan Palabuhanratu sementara berdasarkan data terakhir yang diperoleh adalah 469(masuk kategori sangat mampu).

Semua faktor dikategorikan mampu untuk membentuk sebuah daerah otonom dikarenakan sesuai dengan persyaratan Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007. Dengan hal ini Kecamatan Palabuhanratu dikategorikan sangat mampu untuk membentuk daerah otonom baru.

**Tabel 4.** Analisis Penentuan Pusat Kawasan

No	Kelurahan/ Desa	Aksesibilitas	Gravitasi	Rank Size	Skalogram	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)	% Lahan Terbangun	Ekonomi	Total	Hirarki
1	Palabuhanratu	1	1	1	1	1	1	1	7	1
2	Citarik	3	3	1	4	2	3	1	17	2
3	Citepus	2	2	2	3	1	2	1	13	1
4	Jayanti	2	1	2	4	4	3	2	18	3
5	Cibodas	4	4	2	4	4	3	3	24	4
6	Cimanggu	4	3	3	4	2	3	3	22	4
7	Buniwangi	4	4	3	4	3	3	3	24	4
8	Pasirsuren	4	4	3	4	3	3	2	23	4
9	Tonjong	4	4	3	4	4	2	3	24	4
10	Cikadu	4	4	3	4	3	3	3	24	4

Sumber: Hasil Analisis 2018

Keterangan:	<b>Hirarki</b>	<b>Rentang</b>
	1	9 - 13
	2	14 - 17
	3	18 - 21
	4	22 - 24

Setelah dilakukan analisis di atas, dapat di ketahui bahwa Kecamatan Palabuhanratu memiliki tiga hirarki diantaranya, hirarki pertama Kelurahan Palabuhanratu dan Desa Citepus, hirarki kedua Desa Citarik dan Desa Jayanti, hirarki ketiga hanya Desa Jayanti dan hirarki ke empat diantaranya Desa Cibodas, Desa Cimanggu, Desa Buniwangi, Desa Pasirsuren, Desa Tonjong dan Desa Cikadu.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis kelayakan dengan menggunakan Persyaratan teknis Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah terhadap Kecamatan Palabuhanratu dan Kabupaten Sukabumi, didapatkan hasil bahwa, semua faktor dikategorikan mampu untuk membentuk sebuah daerah otonom dikarenakan sesuai dengan persyaratan Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007.

Hasil analisis Penentuan Kawasan di Kecamatan Palabuhanratu di dapatkan 4 hirarki diantaranya, hirarki pertama Kelurahan Palabuhanratu dan Desa Citepus, hirarki

kedua Desa Citarik dan Desa Jayanti, hirarki ketiga hanya Desa Jayanti dan hirarki ke empat diantaranya Desa Cibodas, Desa Cimanggu, Desa Buniwangi, Desa Pasirsuren, Desa Tonjong dan Desa Cikadu

### **Daftar Pustaka**

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ardhika, Rifky. 2016. *Kajian Kelayakan Kecamatan Tanjungpandan Menjadi Kota Tanjungpandan*. Tugas Akhir. Teknik Planologi, Universitas Islam Bandung. Bandung.
- Ditjen Cipta Karya: 1997, dalam Pontoh, K Nia dan Kustiwan, Iwan. 2009. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung : ITB.
- Firdaus, Enang M. 2013. *Skripsi Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Pangandaran*. Skripsi pada FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- HAW. Widjaja, 2007:133,7-8 -----, 2010, *Teori Otonomi Daerah*. (Online), (<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-otonomi-daerah.html>, diakses 7 april 2018)